

Judul : Subsidi Membengkak : Catatan Khusus dari Senayan
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 1

► **SUBSIDI MEMBENGKAK**

Catatan Khusus dari Senayan

Edi Suwiknyo
redaksi@bisnis.com

JAKARTA — Sidang Paripurna DPR resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 menjadi UU, di mana ada dua catatan penting yang menjadi perhatian, yaitu lonjakan subsidi energi Rp23,88 triliun dan pemangkasan Dana Alokasi Umum Rp12,25 triliun.

Nilai subsidi energi dalam APBN Perubahan 2017 naik cukup tajam, dari Rp77,3 triliun dalam APBN 2017 menjadi Rp101,18 triliun. Kenaikan harga minyak dunia dituding menjadi pemicu lonjakan subsidi energi tersebut.

Ketua Badan Anggaran DPR, dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin memberikan sejumlah masukan terkait dengan jebolnya subsidi tersebut, yaitu *pertama*, pemerintah perlu menggunakan data yang valid dan sumber data yang tunggal untuk semua penyaluran program subsidi energi, subsidi nonenergi, dan bantuan sosial.

Kedua, pemerintah juga harus berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan program subsidi gas LPG 3 kg secara tertutup sehingga kegagalan pada 2017 tak terulang. *Ketiga*, pemerintah perlu menyosialisasikan tabung 5,5 kg sehingga penyaluran tabung subsidi 3 kg bisa tepat sasaran.

Keempat, pemerintah harus berupaya supaya penyaluran subsidi

tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. "Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi tentang kebijakan tarif listrik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak," katanya, Rabu (26/7) malam.

Catatan penting lainnya dalam APBN-P 2017 adalah penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12,25 triliun, dari Rp410,8 triliun menjadi Rp398,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penurunan DAU adalah implikasi dari perubahan pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Artinya, apabila terjadi perubahan pendapatan dalam negeri, alokasi dana alokasi umum juga mengalami perubahan.

"Kebijakan tersebut harus disikapi daerah secara arif demi terciptanya keseimbangan fiskal dan pencapaian program pembangunan daerah, seperti yang telah dilakukan pemerintah pusat selama ini," katanya, Kamis (27/7).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan pemangkasan DAU bagian dari disiplin fiskal. Pasalnya, tidak dipungkiri besarnya dana transfer daerah selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, penambahan subsidi energi tidak terlepas dari ketidakakuratan prediksi harga minyak mentah dunia. "Ini menjadi pelajaran agar pemerintah bisa lebih realistis melihat *outlook* harga komoditas, khususnya minyak." 